

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Umum Kota Yogyakarta**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota/kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kota ini juga memiliki kedudukan sebagai ibu kota provinsi di Yogyakarta. Kota ini memiliki wilayah yang berada tepat di tengah Provinsi di Yogyakarta, dan juga merupakan satu satunya wilayah berstatus kota dari seluruh daerah tingkat II di DIY. Secara administratif, Kota Yogyakarta saat ini terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW dan 2531 RT.

Kota Yogyakarta yang berada di dataran rendah ini memiliki luas 32,5  $M^2$  yang berarti menempati 1,025% dari luas keseluruhan Provinsi DIY. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman di sebelah utara, timur dan barat serta Kabupaten Bantul di sebelah timur, selatan dan barat. Kota ini juga di lalui oleh 3 buah sungai, yaitu Sungai Gajah Wong di sebelah timur, Sungai Code yang membelah Kota Yogyakarta di bagian tengah dan Sungai Winongo di sebelah barat.

## 2. Kondisi Demografis

Dilansir dari laman resmi Kota Yogyakarta, Menurut data sensus tahun 2000, Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk mencapai 493.903 jiwa, yang kemudian menciptakan angka kepadatan penduduk mencapai 15.197/ $Km^2$  yang tentunya jauh lebih tinggi di bandingkan angka kepadatan penduduk kabupaten di sebelahnya, yaitu Kabupaten Sleman dan Bantul, yang hanya berkisar di angka 1.479 dan 1.884. Angka harapan hidup penduduk kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun.

## 3. Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya di DIY meliputi Kependudukan, tenaga kerja, dan transmigrasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan.

### a. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan di kota Yogyakarta teruslah bertambah naik dari tahun ke tahun kenaikan rata rata 1,1 % Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk di kota Yogyakarta memiliki kecendrungan yang meningkat pula hingga 2,1% di tinjau dari sisi distribusi penduduk menurut usia, terlihat kecendrungan yang semakin naik atau meningkat pada penduduk atau warga yang berusia lanjut seperti di atas usia 60 tahun. Angka kerja di kota Yogyakarta pun meningkat

hingga 71,41% di sektor pertanian kemudian disusul sektor jasa jasa lainnya.

b. Kesejahteraan dan Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu aspek terpenting di dalam kehidupan manusia, pembangunan kesehatan menjadi salah satu instrumen dalam upaya kesejahteraan masyarakat. Terdapat sekitar 275.110 warga kurang mampu akan tetapi bantuan yang tersalurkan setiap tahun bahkan bulannya selalu naik cukup tinggi.

Arah pembangunan kesehatan di kota Yogyakarta secara umum pun guna kesejahteraan masyarakat di kota Yogyakarta dengan “memiliki status kesehatan masyarakat yang tinggi tidak hanya dalam batas nasional tetapi memiliki kesetaraan di tataran Internasional khususnya Asia Tenggara dengan mempertinggi keasadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan yang sehat.”

4. Pendidikan

Penyebaran sekolah untuk menjenjang SD/MI sampai Sekolah Menengah sudah merata hingga ke pelosok daerah atau menjangkau seluruh wilayah di kota Yogyakarta. Sedangkan ketersediaan guru pun cukup memadai di kota Yogyakarta. Walaupun masih ada keterbatasan dari sisi kemanusiaannya itu sendiri untuk menjadi guru di daerah pelosok akan tetapi pemerintah Yogyakarta terus mengupayakan

bagaimana agar seluruh masyarakat DIY mendapatkan pendidikan sesuai dengan haknya masing masing.

#### 5. Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Menurut “UU Nomor 22 Tahun 1948 (yang juga menjadi landasan UU Nomor 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan DIY), Kepala, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu, pada zaman sebelum Republik Indonesia, dan yang masih menguasai daerahnya; dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu. Dengan demikian Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1988, dijabat secara otomatis oleh Sultan Yogyakarta yang bertahta, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1998, dijabat secara otomatis oleh Pangeran Paku Alam yang bertahta. Nomenklatur Gubernur, dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa baru digunakan mulai tahun 1999 dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999. Saat ini mekanisme pengisian jabatan Gubernur, dan Wakil Gubernur DIY diatur dengan UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.”

#### **B. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Nama PKS sendiri baru muncul pada Pemilu 1999. “Ketika itu PKS bernama Partai Keadilan (PK). Kemunculan perdananya kala itu menarik perhatian banyak pengamat politik. Peneliti politik, Burhanuddin Muhtadi,

dalam bukunya berjudul Dilema PKS: Suara dan Syariah, menulis bahwa PK adalah satu-satunya partai yang ketika awal berdirinya punya struktur kepengurusan yang amat transparan”.

"Partai ini terorganisir rapi dan memiliki agenda program yang jelas," tulis Burhanuddin. "Tak seperti partai Islam lain, yang bergantung pada ketokohan atau figur, PK mengedepankan egalitarianisme. Tak ada figur kunci yang amat dominan seperti Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa, misalnya. Asas egalitarianisme ini memandang semua anggota partai sama, sederajat."

Selain itu, "PK juga mementingkan kekuatan kolektif dan tidak banyak memberi ruang bagi kemunculan tokoh karismatik. "PK menggalang basis dukungannya dari kalangan aktivis Tarbiyah," kata Burhanuddin. "Kebanyakan mereka berasal dari daerah perkotaan, terdidik, berusia muda, dengan pandangan agama yang ortodoks." Tapi ternyata kemunculan PK tak mempesona sebagian pemilih Indonesia. Pada Pemilu 1999, suara mereka amat minim, yakni hanya 1,3 persen. (Awal Mula Kelahiran PKS, 2013)"

### **C. PKS di DI Yogyakarta**

Kantor pusat Partai Keadilan Sejahtera yang berada di Yogyakarta berada di Jalan Gambiran No. 43, Yogyakarta dengan keadaan partai politiknya yang terus berkembang baik di dalam kota yang mayoritas muslim ini, dengan berlandaskan partai dakwah. Menurut Sohibul Iman, diusianya

yang sudah memasuki 20 tahun, PKS terus menunjukkan eksistensinya dan tumbuh menjadi partai besar dan diperhitungkan. Namun demikian, perkembangan tersebut juga mendatangkan tantangan/rintangan yang besar pula berupa fitnah dan konspirasi. "Hal itu wajar karena ada pihak-pihak yang terganggu dengan eksistensi PKS yang semakin diperhitungkan di kancah perpolitikan tanah air," terang Sohibul Iman saat acara. (Widiyanto, 2018)

Dilihat dari kumpulan aktor, PKS menunjukkan dirinya adalah partai politik yang mempunyai SDM yang terdidik dengan sangat baik, dilihat dari basis pendidikan atau intelektual, aktor-aktor politik PKS di level kota Yogyakarta merupakan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Hampir semuanya merupakan sarjana strata. Citra diri sebagai partai yang mengedepankan profesionalisme.

Dilihat dalam konteks kaderisasi partai, aktivisme beroorganisasi yang ditunjukkan aktor politik PKS menjadi modal berharga bagi PKS. Kuatnya latar belakang organisasi yang dimiliki aktor tentu memudahkan PKS sebagai institusi dalam bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Ini karena para aktor telah mempunyai tradisi berorganisasi sejak masih muda sehingga tidak lagi canggung ataupun gagap ketika berkomunikasi dengan masyarakat.

Secara struktural, proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan PKS ada di berbagai tingkatan mulai kabupaten di bawah kendali struktur pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) lalu untuk kecamatan di

bawah koordimasi dewan pimpinan kecamatan (DPC) dan untuk tingkat desa atau kelurahan di bawah koordinasi dewan pimpinan ranting (DPRa).